



**LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022. Semoga Laporan Keuangan ini dapat digunakan sebagai bahan pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 .

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, terima kasih.

Payakumbuh, 8 Februari 2023

KEPALA DINAS



Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si

NIP. 19660828 199803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sultan Hasanuddin No. 30 Kelurahan Ibul, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh
e-mail : kominfo@limapuluhkotakab.go.id kode pos: 26229

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Payakumbuh, 8 Februari 2023

KEPALA DINAS

Ir. EKLHARI PURNAMA, M.Si

NIP. 19660828 199803 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Daftar Isi	iii
Neraca	iv
Laporan Operasional	vi
Laporan Perubahan Ekuitas.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	3
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIANTARGET KINERJA APBD	5
2.1 Ekonomi Makro	5
2.2 Kebijakan Keuangan	5
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	5
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	10
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	10
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	10
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	11
4.1 Entitas Akuntansi	11
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	14
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	16
5.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja	16
5.2 Neraca	18
5.3 Laporan Operasional.....	20
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas.....	

BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN..	24
BAB VII	PENUTUP	26

LAMPIRAN

Lampiran A	: Rekapitulasi Belanja Tahun 2022
Lampiran B	: Rekapitulasi Pajak 2022
Lampiran C	: Setoran UYHD 2022
Lampiran D	: SPJ Fungsional 2022
Lampiran E	: Rekapitulasi SP2D 2022
Lampiran F	: Rekapitulasi Inventaris per 31 Desember 2022
Lampiran G	: Daftar Mutasi Barang 2022
Lampiran H	: Tabel Akumulasi Penyusutan Aset 2022
Lampiran I	: Kertas Kerja 2022
Lampiran J	: Info AkruaI

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.01	Pajak Daerah-LRA				
1.1.02	Retribusi Daerah-LRA				
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1.1.04	Lain-lain PAD yang Syah	-	-		-
	JUMLAH PAD				
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI				
2.1.01	Belanja Pegawai	3.366.584.968,00	3.308.169.708,00	98,26	3.053.287.083,00
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.607.215.769,00	4.414.013.613,00	95,81	4.834.689.926,00
2.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	149.454.856,00	99,64	-
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	8.123.800.737,00	7.871.638.177,00	96,90	7.887.977.009,00
2.2	BELANJA MODAL				
2.2.01	Belanja Modal Tanah				
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.400.000,00	121.500.000,00	86,54	459.224.707,00
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
	Jumlah Belanja Modal	140.400.000,00	121.500.000,00	86,54	459.224.707,00
	JUMLAH BELANJA	8.264.200.737,00	7.993.138.177,00	96,72	8.347.201.716,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(8.264.200.737,00)	(7.993.138.177,00)	96,72	(8.347.201.716,00)

Payakumbuh, Februari 2023

KEPALA DINAS


Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si
 NIP. 196408281998031002

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No. Akun	Uraian	2022	2021
1.	ASET		
1.1.	ASET LANCAR		
1.1.01.	Kas dan Setara Kas		
1.1.01.02.	Kas di Bendahara Penerimaan		
1.1.01.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran		
1.1.01.04.	Kas di BLUD		
1.1.01.05.	Kas Dana BOS		
1.1.01.06.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
1.1.01.07.	Kas Lainnya		
1.1.03.	Piutang Pajak Daerah		
1.1.04.	Piutang Retribusi		
1.1.05.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.05.03.	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta		
1.1.06.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.06.06.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1.1.06.07.	Piutang Pendapatan Bunga		
1.1.06.16.	Piutang Pendapatan BLUD		
1.1.06.18.	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		
1.1.06.19.	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1.1.07.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
1.1.07.01.	Piutang Dana Perimbangan		
1.1.08.	Piutang Transfer Antar Daerah		
1.1.08.01.	Piutang Bagi Hasil		
1.1.09.	Piutang Lainnya		
1.1.10.	Penyisihan Piutang		
1.1.10.01.	Penyisihan Piutang Pendapatan		
1.1.10.01.01.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
1.1.10.01.02.	Penyisihan Piutang Retribusi		
1.1.10.01.03.	Penyisihan Piut. Hasil Pengel. Kekyn Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.10.01.04.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.12.	Persediaan	4.471.600,00	10.620.495,00
	Jumlah Aset Lancar	4.471.600,00	10.620.495,00
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.01.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.01.05.	Dana Bergulir		
1.2.01.05.01.	Dana Bergulir Kepada Koperasi		
1.2.01.05.02.	Dana Bergulir Kepada Masyarakat		
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		
	Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.02.	Investasi Jangka Panjang Permanen		
1.2.02.01.	Penyertaan Modal		
	Jumlah Investasi Jk. Panjang Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
1.3.	ASET TETAP		
1.3.01.	Tanah	31.572.000,00	-
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	4.664.438.714,00	4.518.050.294,00
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	1.062.615.000,00	448.964.000,00
1.3.04.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	287.432.000,00	287.432.000,00
1.3.06.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	- 4.371.309.297,81	- 4.558.561.845,40
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 4.132.578.388,36	- 4.496.933.999,00
1.3.07.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 238.730.909,45	- 61.627.846,40
1.3.07.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
1.3.07.04.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
	Jumlah Aset Tetap	1.674.748.416,19	695.884.448,60
1.5.	ASET LAINNYA		
1.5.03.	Aset Tidak Berwujud		
1.5.03.01.	Aset Tidak Berwujud		

M/1/23
1/2

No. Akun	Uraian	2022	2021
1.5.03.01.01.0005.	Software		
1.5.04.	Aset Lain-lain	-	-
1.5.04.01.	Aset lain-lain	-	-
1.5.04.01.01.0001.	Aset Rusak Berat/Usang		
1.5.04.01.01.0002.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		
1.5.05.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.05.01.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
1.5.06.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-
1.5.06.01.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
	Jumlah Aset Lainnya	-	-
	JUMLAH ASET	1.679.220.016,19	706.504.943,60
2.	KEWAJIBAN	236.280,00	203.480,00
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	236.280,00	203.480,00
2.1.01.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
2.1.05.	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
2.1.06.	Utang Belanja	236.280,00	203.480,00
2.1.06.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa	236.280,00	203.480,00
2.1.06.02.02.	Utang Belanja Jasa	236.280,00	203.480,00
2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon		
2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	236.280,00	203.480,00
2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		
2.1.06.02.02.0062.	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		
2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		
2.1.07.	Utang Jangka Pendek Lainnya		
	JUMLAH KEWAJIBAN	236.280,00	203.480,00
3.	EKUITAS		
3.1.	EKUITAS		
3.1.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.01.	Ekuitas	1.678.983.736,19	706.301.463,60
	JUMLAH EKUITAS	1.678.983.736,19	706.301.463,60
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.679.220.016,19	706.504.943,60

Payakumbuh, 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si
NIP. 196608281998031002

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINASKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

Kode Akun	Uraian	2022	2021	Bertambah/ Berkurang	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7.	PENDAPATAN				
7.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
7.1.01.	Pajak Daerah-LO	-	-		
7.1.02.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	-	-		
7.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-		
7.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	-	-		
	JUMLAH PAD	-	-		
7.2.	PENDAPATAN TRANSFER				
7.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO				
7.2.01.01.	Dana Perimbangan-LO	-	-		
7.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	-	-		
7.2.01.05.	Dana Desa-LO	-	-		
7.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0	0		
7.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil-LO	0	0		
7.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	-	-		
7.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	-	-		
7.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	-	-		
7.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	-	-		
7.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	-	-		
7.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	-	-		
	JUMLAH TRANSFER	0,00	0,00		
7.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0	0		
7.3.01.	Pendapatan Hibah-LO	-	-		
7.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	-	-		
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0	0		
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00		
8.	BEBAN				
8.1.	BEBAN OPERASI	8.454.443.162,16	9.314.090.641,73		
8.1.01.	Beban Pegawai	3.308.169.708,00	3.053.287.083,00		
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	4.400.580.388,00	4.843.406.891,00		
	Beban Persediaan	455.445.932,00	552.933.419,00		
	Beban Jasa	3.505.738.428,00	3.955.988.637,00		
	Beban Pemeliharaan	40.726.248,00	68.779.571,00		
	Beban Perjalanan Dinas	398.669.780,00	265.705.264,00		
8.1.05.	Beban Hibah	149.454.856,00	-		
8.1.06.	Beban Bantuan Sosial	-	-		
8.1.07.	Beban Penyisihan Piutang	-	-		
8.2.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	596.238.210,16	1.326.675.767,73		
8.3.	BEBAN TRANSFER	-	-		
8.4.	BEBAN TAK TERDUGA	-	-		
	Beban Lain-Lain	-	90.720.900,00		
	JUMLAH BEBAN	8.454.443.162,16	9.314.090.641,73		
	SURPLUS/ (DEFISIT)-LO	-8.454.443.162,16	-9.314.090.641,73		

Payakumbuh, Februari 2023

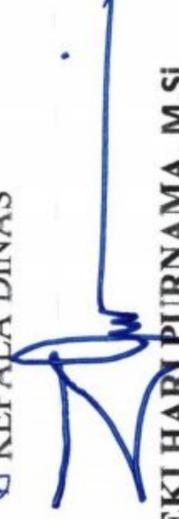
KEPALA DINAS

Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si
NIP. 196608281998031002

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NOMOR	Uraian	2022	2021
1	Ekuitas Awal	706.301.463,60	1.673.190.389,33
2	Surplus/defisit - LO	- 8.454.443.162,16	- 9.314.090.641,73
3	R/K PPKD	7.993.138.177,00	8.347.201.716,00
4	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	1.433.987.257,75	-
	Koreksi Akm. Penyusutan	783.490.757,75	-
	Koreksi Hutang Tahun Lalu	-	-
	Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat	-	-
	Mutasi Tambah Aset Tetap	704.549.000,00	-
	Mutasi Kurang Aset Tetap	- 54.052.500,00	-
	Koreksi Akm. Peny. AT-GB Tahun Sebelumnya	-	-
	Koreksi kurang aset Ekstra Kompatibel	-	-
5	Ekuitas Akhir	1.678.983.736,19	706.301.463,60
	Neraca 31/12/2022 dan 2021	1.678.983.736,19	706.301.463,60

Payakumbuh, Februari 2023
KEPALA DINAS



Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si
NIP. 196608281998031002

*CATATAN
ATAS
LAPORAN
KEUANGAN*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota :

a. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya;
6. Mengatur pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan bidang bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
7. Menyelenggarakan koordinasi dan pemberdayaan dibidang bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
8. Mengadakan pelayanan administrasi dilingkungan organisasi dan unit kerjanya serta pelayanan umum dibidang bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
9. Mengatur pelaksanaan kegiatan penelitian, survey serta pengembangan untuk mendukung kebijakan di bidang bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
10. Melaksanakan pengawasan fungsional dan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.
12. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA/ DPPA Tahun Anggaran 2022, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di sisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA / DPPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1 Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 1.2 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.3 Prosedur penyusunan Laporan Keuangan;

- 1.4 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.5 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;
- II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi makro;
 - 2.2 Kebijakan keuangan;
 - 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan ;
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
- IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah;
 - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
- V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 5.1 LRA
 - 5.2 Neraca
 - 5.3 LO
 - 5.4 LPE
- VI. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan
- VII. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Sesuai dengan tugas pokok dalam menyelenggarakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mampu menciptakan sistem pelayanan yang prima, untuk itu langkah-langkah yang perlu diambil adalah :

1. Menciptakan pelayanan melalui prosedur yang cepat, lancar dan transparandengan sistem yang ramah, sopan dan bersahabat.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman masyarakat dalam beraktifitas dalam bidang Komunikasi dan Informatika .
3. Meningkatkan dan mewujudkan kemampuan aparatur Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota agar bekerja secara profesional sehingga dapat memberikan pelayanan dalam sektor Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola DPA/DPPA Tahun Anggaran 2022 meliputi hal berikut :

2.2.1. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing- masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA/ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA/DPPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA/DPPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Pada tahun anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Penetapan Kinerja yang termuat dalam 5 (Lima) program utama, yaitu:

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.16.01.2.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.16.01.2.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.16.01.2.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.16.01.2.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.16.01.2.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media
2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Belanja

Total realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 8.123.800.737,00 Jumlah tersebut mencapai 96,72 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 7.871.638.177,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi	8.123.800.737,00	7.871.638.177,00	96,90
Belanja Pegawai	3.366.584.968,00	3.308.169.708,00	98,26
Belanja Barang dan Jasa	4.607.215.769,00	4.414.013.613,00	95,81
Belanja Hibah	150.000.000,00	149.454.856,00	99,64
Belanja Modal	140.400.000,00	121.500.000,00	86,54
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.400.000,00	121.500.000,00	86,54
SURPLUS/(DEFISIT)	(8.264.200.737,00)	(7.993.138.177,00)	96,72

Pada Belanja Pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. 3.366.584.968,00 terealisasi sebesar Rp. 3.308.169.708,00 atau sebesar 98,26 %. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi disebabkan karena perbedaan jumlah pegawai pada awal penyusunan anggaran 2022 dengan tahun anggaran berjalan.

Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 4.607.215.769,00 terealisasi sebesar Rp. 4.414.013.613,00 atau sebesar 95,81 %.

Pada belanja Hibah dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 149.454.856,00 atau sebesar 99,64 %.

Pada belanja Modal dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 140.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 121.500.000,00 atau sebesar 86,54 %.

3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan proses pencairan dana APBD. Disamping itu keterlambatan pengesahan perubahan anggaran APBD 2022 sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan terhambat. Dengan keterlambatan tersebut proses keuangan daerah juga menjadi kendala dalam merealisasikan anggaran tahun 2022.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi kinerja yang berkisar 100%. Tapi ada 2 Subkegiatan yang realisasi keuangannya tidak mencapai 75 %, kegiatan tersebut adalah:

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Subkegiatan Manajemen Komunikasi Krisis Kegiatan ini tidak mencapai 75 % disebabkan karena realisasi lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan sehingga dinas Kominfo bisa melakukan efisiensi kebutuhan anggaran untuk kegiatan ini.
2. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Subkegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik ini tidak mencapai 75 % disebabkan karena perencanaan Anggaran kurang matang.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah menetapkan *Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota* yang mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.1. Entitas Akuntansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 telah diserahkan pada masing-masing SKPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah basis akuntansi akrual.

1.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendaharan Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian Aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual. Aset merupakan sumber daya ekonomi dan atau sosial dimasadepan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat , serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang diperlihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomipemerintah. Sedangkan Akuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang.

Mutasi pos-pos Aset, kewajiban dan ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis Akrual pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

2. Invenstasi Jangka Pendek

Invenstasi dalam bentuk surat berharga :

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga inventasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

3. Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan. Biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehaan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang

serupa mengurangi biaya perolehan.

4. *Investasi Jangka Panjang*

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan ak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan memiliki kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).

5. *Tanah*

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

6. *Gedung dan Bangunan*

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

7. *Peralatan dan Mesin*

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk

memperoleh peralatan, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya

langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

8. *Jalan, Irigasi dan Jaringan*

Jalan, irigasi dan jaringan dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

9. *Aset tetap lainnya*

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak serta biaya perizinan.

Aset Tetap Lainnya berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

10. *Konstruksi Dalam Pengerjaan*

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan KDP tersebut. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

3.3. Penerapan Kebijakan Akutansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akutansi Pemerintahan.

1.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan –LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

3.4. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawab atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Plengeluaran berdasarkan azas bruto.

3.5. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat :

Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

Terjadinya konsumsi aset adalah

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan /atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

BAB V

PENJELASAN POS - POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja

No	Perkiraan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021(Rp)
5.	Belanja	7.993.138.177,00	8.347.201.716,00
5.1	Belanja Operasi	7.871.636.177,00	7.887.977.009,00
5.1.1	Belanja Pegawai	3.308.169.708,00	3.053.287.083,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dalam tahun anggaran 2022.

Jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terinci atas :

- Gaji dan Tunjangan	2.421.292.353,00	2.075.252.057,00
- Tambahan penghasilan PNS	893.007.752,00	742.920.026,00
- Uang Lembur PNS		
- Uang Lembur Non PNS		
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif	30.990.000,00	235.115.000,00
Jumlah	3.345.290.105,00	3.053.287.083,00
5.2 Belanja barang dan jasa	4.414.013.613,00	4.834.689.926,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 dan tahun 2021 dimana realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 mencapai 95,81 % dari anggaran yang ditetapkan, dapat dirinci sebagai berikut :

- Belanja Habis Pakai	449.297.037,00	543.737.414,00
- Belanja Jasa Kantor	3.382.474.192,00	3.906.561.825,00
- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	28.316.536,00	21.134.852,00
- Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	94.914.900,00	28.771.000,00
- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
- Belanja Cetak dan pengandaan		
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.341.168,00	68.779.571,00
- Belanja Makan dan Minuman		
- Belanja Perjalanan Dinas	398.669.780,00	265.705.264,00
- Belanja Pemeliharaan		
- Honorarium PNS		
- Honorarium Non PNS		
5.2 Belanja Modal	121.500.000,00	459.224.707,00

Dana Belanja Modal berasal DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 121.500.000,00 dari total anggaran Rp 140.400.000,00 atau 86,54 % dari dana yang dianggarkan.

No	Perkiraan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
----	-----------	------------------------	------------------------

Dengan rincian belanja modal yang terdiri dari:

5.2.2 Belanja Peralatan Mesin	121.500.000,00	459.224.707,00
--------------------------------------	----------------	----------------

Merupakan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin ini tahun 2022 mencapai 86,54 % dari jumlah yang dianggarkan Rp 140.400.000,00.

Realisasi Belanja Modal peralatan dan Mesin tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Belanja Modal Peng. Alat

Ukur Belanja Modal

Pengadaan Alat Kantor

Belanja modal Pengadaan Alat Rumah

Tangga

3.600.000,00	57.458.700,00
--------------	---------------

Belanja Modal Pengadaan

88.600.000,00	337.184.203,00
---------------	----------------

Komputer

Bel. Modal Pengadaan Meja dan Kursi

Belanja Modal Pengadaan Alat studio

29.300.000,00	64.581.804,00
---------------	---------------

Belanja Modal Pengadaan Alat

Komunikasi

5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

-	-
---	---

Belanja modal Pengadaan Bangunan

-	-
---	---

Gedung Kantor

5.2.1 Aset

I. ASET

1.1 ASET LANCAR

1. Kas Dibendahara Pengeluaran

-	-
---	---

Per 31 Desember 2022 kas pada bendahara pengeluaran dinas Komunikasi dan Informatika tidak ada .

2. Persediaan

4.471.600,00	10.620.495,00
--------------	---------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dengan rincian seperti daftar Lampiran

No	Perkiraan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
----	-----------	---------------------	---------------------

1.3 ASET TETAP 6.046.057.714,00 4.518,050,294.00

1.3.1 Tanah 31.572.000,00 -

Jumlah tersebut merupakan nilai Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika posisi per 31 Desember 2022 yang merupakan Hibah/ Mutasi dari Dinas Kesehatan.

1.3.2 Peralatan dan Mesin 4.664.438.714,00 4,518,050,294.00

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika posisi per 31 Desember 2022. Rincian nilai aset sebagai berikut:

Rincian Nilai Aset	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Mutasi Pertambahan		
Rincian Nilai Aset		
- Belanja PM Tahun 2022	121.500.000,00	459,224,707.00
- Kapitalisasi Barang dan Jasa	19.614.920,00	
- Hibah/ Mutasi antar SKPD	59.326.000,00	
Jumlah Mutasi Pertambahan	200.440.920.00	459,224,707.00
Mutasi Pengurangan		
- Belanja Modal Tidak di Kapital	-	80.000.000,00
- Mutasi Ke Asset Extra Com	-	10,720,900,00
- Mutasi Asset ke Sekda	54.052.000,00	
Jumlah Mutasi Pengurangan	54.052.000,00	90.720.900,00
Jumlah Mutasi Bersih	146.388.920,00	368.503.807,00

- Mutasi tambah berupa pembelian/pengadaan aset tetap peralatan mesin sebesar Rp. 121.500.000.00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022. Dengan rincian Terlampir.
- Kapitalisasi Barang dan Jasa sebesar 19.614.920,00.
- Hibah/ Mutasi antar SKPD sebesar Rp. 59.326.000,00 (Mutasi dari Setda berupa Server Aplikasi Simbagda)
- Mutasi ke Setda 2022 sebesar Rp.54.052.000,00 berupa 6 buah Persobal Computer (PC).

No	Perkiraan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.3.3	Gedung dan bangunan	1.062.615.000,00	448.964.000,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika posisi per 31 Desember 2022. Gedung senilai Rp. 613.651.000,00 merupakan penambahan asset Mutasi dari Dinas Kesehatan.		
1.3.4	Aset Tetap Lainnya	287.432.000,00	287.432.000,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika posisi per 31 Desember 2022		
1.4	Akumulasi Penyusutan asset tetap	4.132.578.388,00	4.496.933.999,00
	Jumlah tersebut merupakan Akumulasi Penyusutan asset tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lima Puluh Kota pada posisi per 31 Desember 2022 yang terdiri dari		
1.4.1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.132.578.389,00	4.496.933.999,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan peratan dan mesin per 31 Desember 2022 yang terdiri dari:		
	- Akumulasi Penyusutan kendaraan Roda 4	397.750.000,00	397.750.000,00
	- Akumulasi Penyusutan kendaraan Roda 2	30.021.291,00	30.021.291,00
	- Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur	13.620.362,00	13.620.362,00
	- Akumulasi Penyusutan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	718.216.495,00	616,388,740,00
	- Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	2.649.627.438,00	2.368.199.649.25
	- Akumulasi Penyusutan Alat Studio & Komunikasi	291.573.560,00	247.568.868.80
	- Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	2.300.000,00	-
	- Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	639.540,00	341,088,00
	- Akumulasi Alat Laboratorium	27.544.000,00	-
	- Akumulasi Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian	1.285.703,00	-

No	Perkiraan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
a.	Akumulasi Penyusutan kendaraan Roda 4 sebesar	397.750.000,00.	Dengan rincian Terlampir.
b.	Akumulasi Penyusutan kendaraan Roda 2 sebesar	30.021.291,00.	Dengan rincian Terlampir
c.	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur sebesar	13.620.362,00.	Dengan rincian Terlampir.
d.	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar	718.216.495,00,00.	Dengan rincian Terlampir.
e.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer sebesar	2.649.627.438,00	Dengan rincian Terlampir.
f.	Akumulasi Penyusutan Alat Studio & Komunikasi sebesar	291.573.560,00.	Dengan rincian Terlampir.
g.	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan sebesar	2.300.000,00.	Dengan rincian Terlampir.
h.	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran sebesar	639.540,00	Dengan rincian Terlampir.
i.	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium sebesar	27.544.000	Dengan rincian Terlampir.
j.	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian sebesar	1.285.703,00	Dengan rincian Terlampir.
1.4.2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 yang terdiri dari:	238.730.909,00	61.627.846.40
	- Akumulasi Peny. Bangunan Gedung LPSE	238.730.909,00	61.627.846.40
	- Akumulasi Penyusutan Tralis Pengaman Pintu		
	- Akumulasi Penyusutan Tralis Pengaman Jendela		
2.	KEWAJIBAN	236.280,00	203.480,00
3.	EKUITAS	1.678.983.736,00	706.301.463,60
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.679.220.016,00	706.504.943,60

- 3.1 EkuitasEkuitas
 3.1.1 Jumlah tersebut merupakan nilai Ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika pada posisi per 31 Desember2022 sebesar Rp. 1.678.983.736,19

LAPORAN OPERASIONAL

5.3

Laporan Operasional **8.454.443.162,16** **9.314.090.641.73**
 Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional tahun anggaran 2022. Jumlah beban tersebut terinci sebagai berikut :

8.1	BEBAN OPERASI	Realisasi 2021	Realisasi 2020
8.1.1	BEBAN OPERASIONAL	8.454.443.162,16	9.314.090.641,73
9.1	Beban Pegawai	3.308.169.708,00	3.053.287.083,00

Beban Pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

	<i>BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN-LO</i>	2.415.161.956,00	2.310.367.057,00
-	Gaji Pokok PNS/Uang Represtasi-LO	1.831.194.640,00	1.596.342.780,00
-	Tunjangan Keluarga-LO	166.693.203,00	144.387.479,00
-	Tunjangan Jabatan-LO	211.380.000,00	191.405.000,00
-	Tunjangan Fungsional Umum-LO	50.250.000,00	36.745.000,00
-	Tunjangan Beras-LO	107.543.700,00	91.756.140,00
-	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus-LO	2.034.691,00	1.480.241,00
-	Belanja Pembulatan Gaji ASN	26.124,00	1.723,00
-	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.762.396,00	3.283.444,00
-	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.287.202,00	9.850.250,00
-	Honorarium	29.040.000,00	234.365.000,00
-	Belanja Honorarium Pengadaan	1.950.000,00	750.0000,00
-	Gaji Ketiga Belas	-	-
-	Tunjangan Hari Raya	-	-
	<i>BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS-LO</i>	893.007.752,00	742.920.026,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja-LO	893.007.752,00	742.920.026,00

No	Perkiraan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	BEBAN PERSEDIAAN	455.445.932,00	552.933.419,00
<p>Jumlah ini merupakan realisasi beban persediaan dalam tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:</p>			
-	Beban bahan Bakar dan pelumas	94.149.700,00	204.743.314,00
-	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	350.000,00
-	Beban Alat Tulis Kantor-LO	21.698.282,00	30.345.318,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	150.165.850,00	185.753.687,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	703.000,00	910.900,00
-	Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	161.659.100,00	-
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	-	6.000.000,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	2.957.000,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- PerlengkapanDinas	-	3.900.000,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahanuntuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	85.280.700,00
-	Beban Makanan dan Minuman Rapat	19.577.500,00	27.195.000,00
-	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.492.500,00	5.497.500,00
	JUMLAH	455.445.932,00	552.933.419,00

2. BEBAN JASA

3.505.738.428,00 3.955.988.637,00

Jumlah tersebut merupakan jasa dalam tahun anggaran 2022, dengan dirinci sebagai berikut :

BEBAN JASA KANTOR	3.505.738.428,00	3.955.988.637,00
- Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.400.000,00	6,600,000.00
- Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	11,800,000.00
- Beban Jasa Tenaga Administrasi	252.000.000.00	341,450,000.00
- Beban Jasa Operator Komputer	14.400.000,00	-
- Beban Jasa Tenaga Ahli	39.600.000,00	11.850.000,00
- Beban Jasa Tenaga Keamanan	14.400.000,00	26.400.000,00
- Beban Jasa Tenaga Supir	-	18.000.000,00
- Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	108.000.000,00	125.700.000,00
- Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	427.745.000,00	419.380.000,00
- Beban Tagihan Telepon	-	-
- Beban Tagihan Air	2.398.880,00	2.041.280,00
- Beban Tagihan Listrik	101.214.612,00	82.148.605,00
- Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	192.888.000,00	223.003.500,00
- Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.191.726.000,00	2.611.123.400,00
- Beban Paket/Pengiriman	-	-
- Beban Lembur	29.734.500,00	26.586.000,00
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	25.720.000.00	18,149,620.00 2,238,924.00
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	974.536.00	746,308.00
- Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.622.000.00	1,060,000.00 27,711,000.00
- Beban Kursus Singkat/Pelatihan	62.195.000.00	
- Beban Sosialisasi	31.979.900.00	
- Beban Bimbingan Teknis	740.000,00	
Beban Pemeliharaan	40.726.428,00	68,779,571.00
- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.726.428 00	68,779,571.00
- Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.025.000.00	1,965,000.00

- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	13.737.223,00	19,004,571.00
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.787.000.00	1,517,500.00
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Pendingin	610.000,00	
- Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit- Komputer Jaringan	16.634.835.00	39,637,500.00
- Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit- Personal Computer	2.229.000.00	5,640,000.00
- Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	-	1,015,000.00
- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.703.190,00	-
- Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kantor	3.703.190,00	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.964.780.00	190.620.264,00
- Beban Perjalanan Dinas Biasa	97.705.000.00	75.085.000,00
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		
Beban Penyusutan	596.235.210,16	746,826,494.00
- Beban Penyusutan PM	419.135.147,11,00	737,847,214.00
- Beban Penyusutan Gedung Bangunan	177.103.063,05,00	8,979,280.00
- Beban Penyusutan JIJ	-	
- Beban Penyusutan ATL	-	
Beban Lain - lain	-	31,846,000.00
- BM tidak dikapitalisir	-	2,660,000.00
- Aset Extrakom	-	29,186,000.00
Beban Hibah	149.454.856,00	
- Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk berdasarkan peraturan Perundang	99.454.056,00	
- Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kemasyarakatan	50.000.000,00	

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan dan penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Ekuitas Awal	706.301.463,00	1.673.190.389,33
Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 706.301.463,40.		
5..3.2. Surlpus/(Defisit)- LO	(8.454.443.162,16)	(9,314,090,641.73)
Merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan Surlpus/ Defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Rincian Surlpus/Defisit-LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 berupa:		
Pendapatan	0	0
Beban-LO	(8.454.443.162,16)	(9,314,090,641.73)
Jumlah	(8.454.443.162,16)	(9,314,090,641.73)
5..3.3. R/K PPKD	7.993.138.177,00	8,347,201,716,00
R/K PPKD merupakan jumlah belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 yang belanjanya bersumber dari penerbitan SP2D UP/GU/LS/TU		
5..3.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	0	0
Koreksi Akm. Penyusutan	783.490.757,75	0
Mutasi Tambah Aset Tetap	704.549.000,00	0
Mutasi Kurang Aset Tetap	(54.052.500)	0
5..3.5. Ekuitas Akhir	1.678.983.736,19	706,301,463.60
Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas akhir Tahun 2022		

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Bidang Komunikasi Publik
 - Sub Koordinator pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Sub Koordinator Layanan Hubungan Media dan Kehumasan
 - Sub Koordinator Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
4. Bidang Aplikasi dan Informatika
 - Sub Koordinator Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi & Komunikasi; dan
 - Sub koordinator Aplikasi.
5. Bidang Persandian dan Manajemen Data Elektronik.
 - Sub koordinator Identifikasi, Deteksi, dan Proteksi Keamanan Siber;
 - Sub koordinator Penanggulangan, Pemulihan, Pemantauan, dan Pengendalian Keamanan Siber; dan
 - Sub Koordinator Manajemen Data Elektronik.
6. Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik
 - Sub Koordinator Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
 - Sub Koordinator Statistik Sektor Pemerintahan dan Sosial Budaya; dan
 - Sub Koordinasi Pelayanan Informasi Publik.

Karyawan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota padatahun 2022 berjumlah 64 orang dengan rincian :

- Pegawai Negeri Sipil berjumlah 40 orang dengan Rincian sebagai berikut:

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	II. b	1 orang
2.	Sekretaris / Kepala Bidang	III.a / III.b	5 orang
3.	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi	IV.a/IV.b	13 orang
4.	Staf PNS		21 orang
6.	Staf THL		20 orang
7.	Staf THL Khusus		4 orang

BAB VII

PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Total realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 8.264.200.737,00 Jumlah tersebut mencapai 96,72 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 7.993.138.177,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi	8.123.800.737,00	7.871.638.177,00	96,84
Belanja Pegawai	3.366.584.968,00	3.308.169.708,00	98,26
Belanja Barang dan Jasa	4.607.215.769,00	4.414.013.613,00	95,81
Belanja Hibah	150.000.000,00	149.454.856,00	99,64
Belanja Modal	140.400.000,00	121.500.000,00	86,54
Belanja Modal Peralatandan Mesin	140.400.000,00	121.500.000,00	86,54
SURPLUS/(DEFISIT)	(8.264.200.737,00)	(7.993.138.177,00)	96,72

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.01.00	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	259.200.000,00	252.000.000,00	97,22	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	39.600.000,00	39.600.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	479.800.000,00	427.745.000,00	89,15	
2.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Telepon	420.000,00	-	-	
2.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Air	3.000.000,00	2.366.080,00	78,87	
2.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Listrik	102.590.810,00	101.214.612,00	98,66	
2.1.02.02.01.00	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	206.040.000,00	192.888.000,00	93,62	
2.1.02.02.01.00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.215.015.000,00	2.191.726.000,00	98,95	
2.1.02.02.01.00	Belanja Lembur	29.813.000,00	29.734.500,00	99,74	
2.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	35.781.624,00	28.316.536,00	79,14	
2.1.02.02.02.00	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	29.526.240,00	25.720.000,00	87,11	
2.1.02.02.02.00	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.099.427,00	974.536,00	46,42	
2.1.02.02.02.00	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.155.957,00	1.622.000,00	39,03	
2.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	96.516.900,00	94.914.900,00	98,34	
2.1.02.02.12.00	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	62.437.000,00	62.195.000,00	99,61	
2.1.02.02.12.00	Belanja Sosialisasi	32.779.900,00	31.979.900,00	97,56	
2.1.02.02.12.00	Belanja Bimbingan Teknis	1.300.000,00	740.000,00	56,92	
2.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	63.910.186,00	60.341.168,00	94,42	
2.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.910.150,00	47.638.058,00	93,57	
2.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.407.500,00	2.025.000,00	84,11	
2.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	13.737.750,00	13.737.223,00	100,00	
2.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.925.000,00	1.787.000,00	92,83	
2.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	610.000,00	610.000,00	100,00	
2.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	30.000.000,00	27.249.835,00	90,83	
2.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.229.900,00	2.229.000,00	99,96	
2.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.000.036,00	12.703.110,00	97,72	
2.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	13.000.036,00	12.703.110,00	97,72	
2.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	407.896.600,00	398.669.780,00	97,74	
2.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	407.896.600,00	398.669.780,00	97,74	
2.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	302.731.600,00	300.964.780,00	99,42	
2.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	105.165.000,00	97.705.000,00	92,91	
2.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	149.454.856,00	99,64	

Kode Barang (1)	Nama Barang (2)	NIBAR (3)	Nomor Register (4)	Spesifikasi Nama Barang (5)	Merek/ tipe (6)	Spesifikasi Lainnya (7)	Lokasi (8)	Kendaraan Dinas*)			Jumlah (12)	Satuan (13)	Harga Satuan Perolehan (Rp) (14)	Nilai Perolehan (Rp) (15)	Cara Perolehan (16)	Tanggal Perolehan (17)	Status Penggunaan (18)	Keterangan (19)
								Nomor Polisi (9)	Nomor Rangka (10)	Nomor BPKB (11)								
1.3.2.05.02.06.059	Gordyin/Kray		000001	-							1	Unit	1.510.000	1.510.000	Pembelian	2019		
1.3.2.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain		000001	Kabel							1	Unit	1.932.955	1.932.955	Pembelian	2013		
1.3.2.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain		000002	Banner							1	Unit	6.000.000	6.000.000	Pembelian	2015		
1.3.2.05.02.07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN												3.900.000					
1.3.2.05.02.07.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya		000001	Gunnebo 9 Kg / Breaket							1	Unit	3.000.000	3.000.000	Pembelian	2016		
1.3.2.05.02.07.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya		000001 s/d 00012	-							2	Unit	450.000	900.000	Pembelian	2020		
1.3.2.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT												124.794.315					
1.3.2.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT											Unit	36.569.500					
1.3.2.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II		000001	-							1	Unit	4.070.000	4.070.000	Pembelian	2017		
1.3.2.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III		000001 s/d 0005	-							1	Unit	2.915.000	2.915.000	Pembelian	2017		
1.3.2.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III		000001 s/d 0005	-							4	Unit	2.343.000	9.372.000	Pembelian	2017		
1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		000001 s/d 00015	-							15	Unit	1.347.500	20.212.500	Pembelian	2017		
1.3.2.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT												65.139.815					
1.3.2.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II		000001	-							1	Unit	3.760.000	3.760.000	Pembelian	2017		
1.3.2.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		000006	-							1	Unit	2.556.973	2.556.973	Pembelian	2016		
1.3.2.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		000001 s/d 0008	Aktive / Kent Kd 101							8	Unit	1.250.000	10.000.000	Pembelian	2017		
1.3.2.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		000007	Aktivekent Kd 101							1	Unit	1.250.000	1.250.000	Pembelian	2017		
1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		000013	-							1	Unit	2.556.973	2.556.973	Pembelian	2016		
1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		000014	-							1	Unit	2.556.973	2.556.973	Pembelian	2016		

**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PADA PENGGUNA BARANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PERALATAN DAN MESIN
PROVINSI SUMATERA BARAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022**

Pengguna Barang : Dinas Komunikasi dan Informatika
Kode lokasi : 2

Kode Barang (1)	Nama Barang (2)	NIBAR (3)	Nomor Register (4)	Spesifikasi Nama Barang (5)	Merek/ Tipe (6)	Spesifikasi Lainnya (7)	Lokasi (8)	Kendaraan Dinas*)			Jumlah (12)	Satuan (13)	Harga Satuan Perolehan (Rp) (14)	Nilai Perolehan (Rp) (15)	Cara Perolehan (16)	Tanggal Perolehan (17)	Status Penggunaan (18)	Keterangan (19)
								Nomor Polisi (9)	Nomor Rangka (10)	Nomor BPKB (11)								
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN												4.725.220.114					
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN												427.771.291					
1.3.2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR												427.771.291					
1.3.2.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN												161.150.000					
1.3.2.02.01.01.006	Kendaraan Roda Empat		0001	Suzuki Apv	Suzuki/GC415VAP VDLXMT	No. Mesin GIS.41D164188		BA 2740 CJ	MHYGD N42V7J3 01319	9474610	1	Unit	161.150.000	Mutasi Sekwan	2008	Nuzul Firman, S.IP, M.Si		
1.3.2.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG												236.600.000					
1.3.2.02.01.02.003	Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat		001	Toyota Mini Bus KF50	Toyota Mini Bus KF50	No. Mesin 5K-9113583		BA 3442 CA	KF50-125474	0427819	1	Unit	37.500.000	Mutasi Setda	1992	Deni Permana, S.Sos		
1.3.2.02.01.02.005	Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat		001	Toyota/Rush 1.5 S	Toyota/Rush 1.5 S	No. Mesin DBA7365		BA 2746 CJ	MHFE2C J3J8K01 374	4600297	1	Unit	199.100.000	Mutasi Setda	2008	Ir. Eki Hari Purnama, M.Si		
1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA												30.021.291					
1.3.2.02.01.04.001	Kendaraan Roda 2		0001	Honda New Supra X 125 Cw	Honda/NF 125 TD			BA 6776 C (BA 6774 C)	MH1JB8 1147K1 07128	0822153	1	Unit	13.950.000	Mutasi Dishub	2007	Joni Indra, S.Kom		
1.3.2.02.01.04.001	Kendaraan Roda 2		0001	Honda New Supra X 125 Cw				BA 3843 C	MH1JBG 1170K1 22051	0171575	1	Unit	16.071.291	Mutasi Setda	2013	Febia Triana, S.Pd		
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR												13.620.362					
1.3.2.03.03	ALAT UKUR												13.620.362					
1.3.2.03.03.01	ALAT UKUR UNIVERSAL												13.620.362					
1.3.2.03.03.01.072	Global Positioning System		0001	Global Positioning System	Garmin						1	Unit	3.976.362	Mutasi Dishub	2013	Sekre		
1.3.2.03.03.01.072	Global Positioning System		0001	Global Positioning System	Garmin						1	Unit	9.644.000	Pembelian	2017	Sekre		

Setoran Seperti yang

Model : Bend. 17

Lembar ke :

2869000116 0101 2869 30/12/2022
..... Dalam Tahun 20.....
0101 0101001000103401360 IDR 2,006,117
PENERIMAAN KABUPATEN 50 KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / YULINETTI 30/12/2022 16:45:54

SURAT TANDA SETORAN

Setoran seperti ini yang terakhir telah dilakukan pada tanggal

No.

Kepada Kas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota / Bank Nagari **Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat** Cabang Payakumbuh di **Payakumbuh Nomor Rekening : 0100.0101.00202-9**

Harap menerima uang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Sebesar :

Rp. 2.006.117,-

(dengan huruf) : Dua juta enam ribu seratus tujuh belas rupiah.

Yaitu : Ganti Uang (GU) sebanyak Rp. 2.006.117,-

Kepala Pembukuan
Kasubbag Keuangan



Yulinetti

Nip. 19651011 198703 2 001

Payakumbuh, 30 Desember 2022
Bendahara Pengeluaran

Candra. S. Kom

Nip. 19851009 201902 1 001

Uang tersebut diatas

Diterima **30 DEC 2022**

..... Tgl, 20.....

nk Nagari

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Alamat:

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 Ibh Payakumbuh - Telp. (0751) 7971607

Website : <http://www.limapuluhkotakab.go.id>

E-mail : kominfo@limapuluhkotakab.go.id